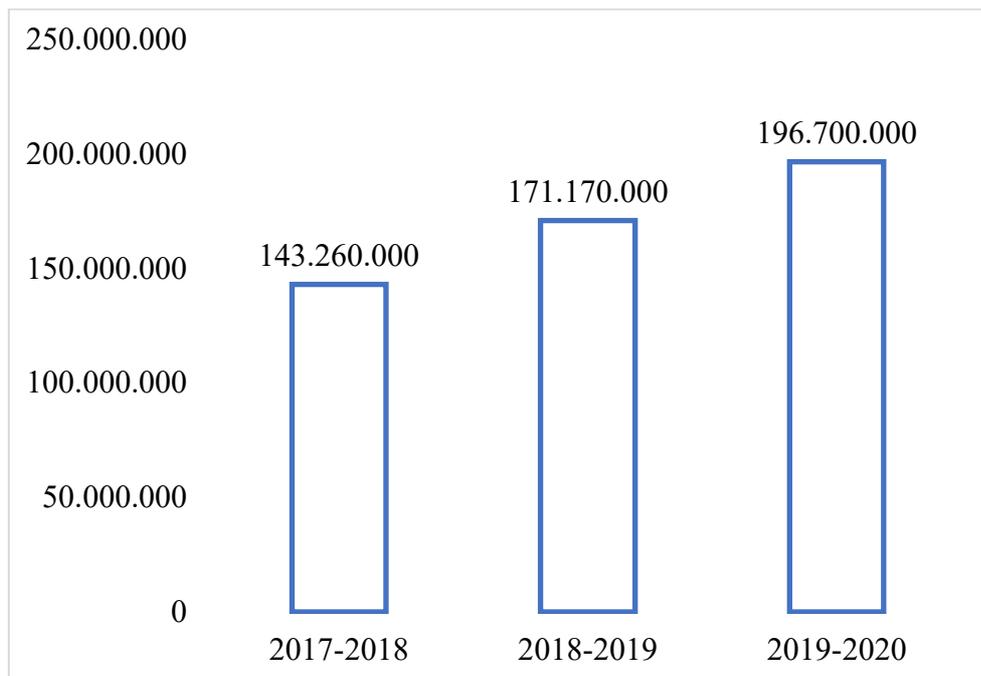


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era revolusi industri 4.0 berhasil mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk bergantung pada teknologi, yang berarti teknologi menguasai seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang informasi dan komunikasi. Masyarakat Indonesia tidak terlepas dari adanya teknologi telekomunikasi dan informasi, yang dibuktikan dengan tingginya pengguna internet di Indonesia.



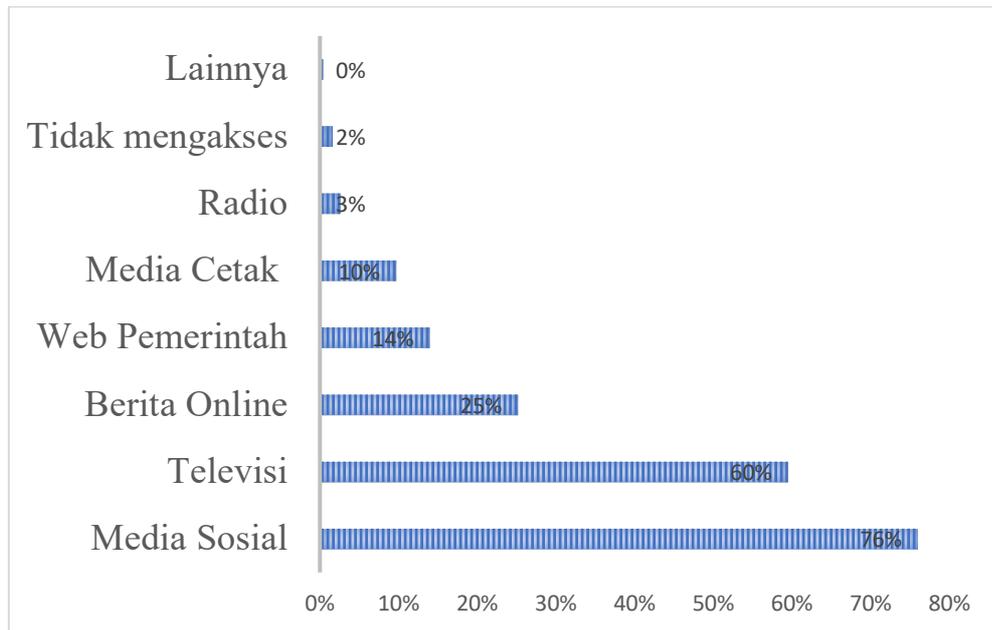
Gambar 1. 1. Data Tingkat Penetrasi Penggunaan Internet di Indonesia

Sumber : Laporan Tahunan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 2020

Grafik data diatas menunjukkan tingginya persentase penetrasi penggunaan internet di Indonesia tahun 2020. Hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet

Indonesia (APJII) 2020 menyatakan bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia terus meningkat. Penetrasi pengguna internet Indonesia naik menjadi 64,8% dari tahun 2018 dan 73,7% dari tahun 2019. Pengguna internet di tahun 2018 sebanyak 171,17 juta pengguna, dan terus mengalami peningkatan hingga 196,7 juta pengguna di tahun 2020.

Masyarakat Indonesia telah menguasai penggunaan internet dalam mencari informasi serta berkomunikasi, salah satu media yang digunakan adalah media sosial. Dalam sebuah survei Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Katadata Insight Center (KIC) Tahun 2020, menunjukkan sebanyak 76% responden penelitian menyatakan kecenderungannya dalam memilih media sosial sebagai sumber akses informasi, sementara 59,5% responden lain menyatakan televisi sebagai akses informasi, dan 25,2% lainnya mengakses informasi melalui berita online.



Gambar 1. 2. Hasil Survey Kebiasaan Bermedia Masyarakat

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika

Tingginya penggunaan sosial media oleh masyarakat Indonesia untuk mengakses konten informasi dan komunikasi tidak menjamin kebijakan dan kedewasaan masyarakat Indonesia di ruang digital. Banyak masyarakat yang menyalahgunakan kebebasannya di media sosial dalam mengakses informasi dan komunikasi. Survey Microsoft pada tahun 2021 menyatakan Netizen Indonesia dengan tingkat kesopanan terendah se-Asia Tenggara. Indonesia menempati urutan ke-29 dari 32 negara yang di survey (CNNIndonesia, 2021).

Perkembangan teknologi digital tidak bisa dipungkiri sisi negatifnya, sehingga masyarakat perlu bijak dalam menggunakannya demi mencegah pelanggaran seperti *cyber-bullying*, *phising*, dan menyampaikan pendapat dengan bijak di ranah digital. Tantangan dalam ruang digital semakin bermunculan, seperti

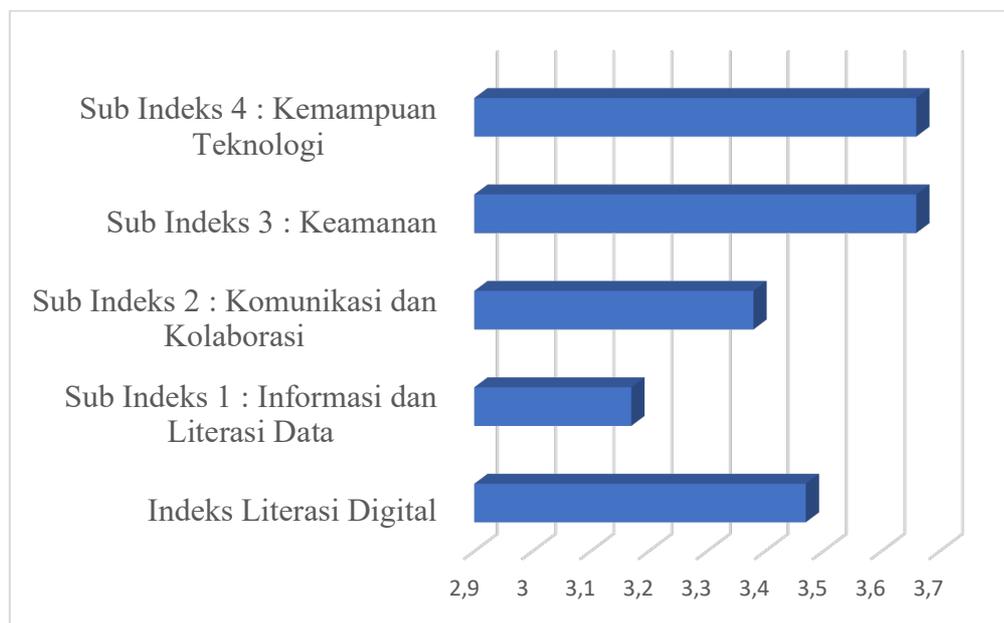
kabar hoaks, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, hingga konten radikalisme.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan Program Literasi Digital ditengah masyarakat Indonesia untuk menuntaskan isu di ruang digital. Program literasi digital diciptakan untuk membangun masyarakat digital yang kondusif dengan meningkatkan keterampilan masyarakat akan teknologi dan membentuk pola pikir kritis dan kreatif bagi seluruh masyarakat secara merata, sehingga mampu memilah segala sesuatu berbasis digital dan mampu menekan kriminal di ruang digital seperti pornografi, hoaks, *hate-speech*, dan lain-lain. Hal ini dinyatakan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani dalam sebuah Webinar dengan Tema literasi digital pada Sabtu bulan Februari 2021 lampau, bahwa literasi digital adalah tingkat paling dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat digital, karena literasi digital berperan andil dalam menyentuh transformasi digital.

Program literasi digital dapat dikatakan berhasil apabila sukses membangun kesadaran masyarakat untuk menangkal konten-konten negatif secara merata. Pemerintah menargetkan masyarakat untuk mampu menguasai dan memahami literasi digital di tahun 2024, sehingga masyarakat pengguna digital mampu ramah digital.

Modul program literasi digital didasarkan pada empat pilar yakni, keamanan digital, keterampilan digital, etika digital, dan budaya digital. Keterampilan digital

merupakan tahapan dimana seorang mampu memahami dan mengoperasikan *software* dan *hardware* teknologi informasi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan, keamanan digital merupakan sebuah kondisi dimana individu mampu mengenali, mengimplementasikan, menganalisis, serta meningkatkan kesadaran untuk aman di media digital dalam kehidupannya sehari-hari. Disamping itu, etika digital merupakan kondisi dimana seorang menyadari dan memberi contoh mengenai tata kelola etika digital. Sementara, budaya digital merupakan kondisi dimana individu mampu untuk memaparkan, melatih, dan mengontrol akses ruang digital sesuai dengan nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.



Gambar 1. 3. Indeks Literasi Media Digital Tahun 2020

Sumber : Laporan Kata Data Insight Center dan Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020

Berdasarkan data hasil survey literasi digital Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Katadata di Indonesia Tahun 2020 menyatakan bahwa literasi digital masyarakat digital di DKI Jakarta masih belum mencapai tingkat baik. Hasil survey memaparkan mengenai indeks literasi digital Indonesia sebesar 3,47 dari skala 4, dengan skala 3,43 pada wilayah Barat yaitu salah satunya DKI Jakarta, 3,57 pada wilayah tengah, dan 3,44 pada wilayah Timur.

Program literasi digital memiliki kelompok sasaran dalam mengevaluasi kelompok mana saja yang berhasil terjangkau dan tersentuh oleh program literasi digital yang telah berjalan. Sasaran program ini terdiri dari kaum muda, remaja, masyarakat umum, orangtua, guru dan dosen, pihak organisasi masyarakat, lembaga sosial masyarakat (LSM), pemerintah, dan media. Salah satu sasaran yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mahasiswa sebagai kaum muda yang paling banyak berkelana di media sosial.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menangani kasus penyebaran konten negatif di situs internet sejumlah 1,5 Juta terhitung sejak Agustus 2018 sampai 30 November 2021. Konten negatif merupakan konten pornografi, konten perjudian, hoaks, penipuan, dan segala konten kriminal di media digital. Pornografi merupakan konten negatif yang paling banyak ditemukan dengan jumlah 1,06 juta konten. Konten pornografi seringkali dijalankan sebagai bisnis oleh mahasiswa. Pada tahun 2019, Polres Metro Jakarta Barat menemukan empat mahasiswa terlibat dalam bisnis pornografi di media sosial twitter yang telah

mencapai 700 pelanggan, dimana dalam bisnis ini mahasiswa memperkerjakan anak-anak dibawah umur sebagai pemeran (Kompas.com, 2020).

Literasi media digital dalam kalangan mahasiswa akan mendorong proses dan strategi mahasiswa di ruang digital untuk berpikir kritis dan mampu memiliki etis yang baik. Seluruh pemangku kepentingan perlu berpartisipasi dalam implementasi literasi media digital ini mengenai konten positif, cerdas, dan kreatif di media digital. Mahasiswa dapat dikatakan cerdas menggunakan media sosial apabila dirinya aman dan mendapatkan manfaat positif. Mahasiswa memiliki tugas dan tanggung jawab penting dalam literasi media digital, dimana perkembangan teknologi dan apapun yang ada di media digital mampu membawa dampak buruk bagi generasi penerus bangsa. Dalam media digital, mahasiswa sebagai agen penerus bangsa ini perlu selektif dalam memilih konten, karena tidak semua informasi yang diterima harus ditanggapi.

Dalam mengimplementasikan Program Literasi Digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan *stakeholder* lainnya dan membawahi Gerakan Siber Kreasi. Program diimplementasikan melalui berbagai jenis inovasi kegiatan hasil Gerakan Siber Kreasi, salah satunya seminar online atau lebih dikenal WEBINAR. Pelatihan literasi media digital dilakukan melalui Webinar dan beberapa kegiatan lainnya.

Implementasi Program Literasi Digital di tengah era pandemi COVID-19 ini tentu mengalami tantangan. Literasi media digital dilakukan melalui Webinar dan beberapa kegiatan lainnya. Mekanisme penyelenggaraan Program Literasi Digital

saat ini dilaksanakan penuh secara online, sehingga tidak bisa mengontrol apakah peserta betul-betul memperhatikan dan menguasai materi yang disampaikan atau tidak. Permasalahan dalam tahap penyelenggaraan Program Literasi Digital adalah pelaksanaan sebuah kegiatan Literasi Digital tidak mencakup keseluruhan empat modul pilar literasi digital, namun hanya mengambil salah satu modul. Dalam tahap penyelenggaraan kegiatan, materi kegiatan yang dilaksanakan seharusnya mencakup empat modul dalam pilar literasi digital, yakni *digital skills*, *digital culture*, *digital ethics*, dan *digital safety*. Pelaksanaan kegiatan literasi digital seharusnya tidak hanya memaparkan arti Program Literasi Digital secara general ataupun mengambil salah satu pilar sebagai tema pelaksanaan, namun menegaskan dan membangun pemahaman peserta mengenai seluruh pilar literasi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam ketentuan penyelenggaraan Program Literasi Digital, penyelenggara seharusnya melaksanakan pre-test dan post-test dalam tahap pasca-pelaksanaan untuk mengetahui apakah seluruh peserta yang mengikuti pelatihan literasi digital sudah mampu memahami materi yang disampaikan. Namun kenyataannya, dalam realisasi Program Literasi Digital, penyelenggara mengganti tahap *pre-test* dan *post-test* dengan *quiz* yang sistem nya dijawab secara sukarela.

Berdasarkan pemaparan permasalahan pada paragraf-paragraf diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Implementasi serta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Implementasi Program Literasi Media Digital di Kalangan Mahasiswa DKI Jakarta. Hasil uraian atas Faktor yang Mempengaruhi

Keberhasilan Implementasi Program Literasi Media Digital dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan terhadap pemerintah atas pengembangan yang perlu dilakukan dalam keberlanjutan implementasi program ini dan rekomendasi dalam formulasi program atau kebijakan terkait berikutnya. Dalam mengeksplorasi argumen penelitian, peneliti berfokus dalam menganalisis Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Program Literasi Media Digital di Kalangan Mahasiswa DKI Jakarta menurut Teori Grindle dalam Buku Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih yang berjudul Implementasi Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian literatur dan wawancara terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku pembuat serta pelaksana program dan 3 Mahasiswa dari Universitas di DKI Jakarta yang menekuni dan telah mengikuti kegiatan literasi media digital sebagai informan dalam penelitian ini. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pemerintah dalam meningkatkan keberhasilan proses Implementasi Program Literasi Digital dan alternatif bagi formulasi program atau kebijakan terkait berikutnya, mengedukasi pembaca mengenai memperkaya pengetahuan bagi akademisi serta praktisi mengenai bagaimana pemerintah melaksanakan Program Literasi Media Digital di Kalangan Mahasiswa DKI Jakarta.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari paparan permasalahan pada bagian latar belakang diatas serta pemikiran penulis mengenai pentingnya uraian implementasi kebijakan sebagai masukan terhadap Pemerintah dalam memformulasikan program berikutnya dan

memperbaiki keberlanjutan implementasi sebuah program pemerintah, maka peneliti tertarik untuk memaparkan

1. Bagaimana implementasi Program Literasi Media Digital di kalangan mahasiswa DKI Jakarta?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat implementasi Program Literasi Media Digital di kalangan mahasiswa DKI Jakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan menguraikan tentang bagaimana implementasi Program Literasi Media Digital di kalangan mahasiswa DKI Jakarta, serta memaparkan apa saja faktor pendorong dan penghambat implementasi Program Literasi Media Digital di kalangan mahasiswa DKI Jakarta.

1.4. Manfaat

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perkembangan ilmu administrasi publik, terutama yang terkait dengan studi implementasi kebijakan, khususnya kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini, peneliti diharapkan mampu memperluas pandangannya mengenai Implementasi Program Literasi Media Digital di Kalangan Mahasiswa DKI Jakarta.

b. Bagi Instansi

Dari hasil penelitian ini, instansi diharapkan mampu melihat lebih lagi dan dapat menjadikan penelitian yang berupa uraian implementasi dan faktor yang mmendorong keberhasilan implementasi ini sebagai pertimbangan dalam memperbaiki dan lebih memperhatikan Implementasi Program Literasi Media Digital sesuai dengan prosedur.

c. Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian ini, pembaca diharapkan mampu memperkaya pandangan nya mengenai pentingnya literasi media digital terutama bagi mahasiswa, serta memberikan referensi dan informasi yang mendalam pada pembaca mengenai bagaimana Implementasi Program Literasi Digital Media.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti tentu tidak terlepas dari penelitian terdahulu sebagai acuan dan eksplorasi pengetahuan serta informasi dan referensi terhadap rumusan maupun hasil dari penelitian ini. Berdasarkan acuan dari penelitian terdahulu mengenai Implementasi Program Literasi Digital yang ditemukan dalam 6 jurnal penelitian yang telah di publish pada website googlescholar, researchgate, dan ProQuest selama periode 2016-2021, peneliti belum menemukan kesamaan judul dengan penelitian lainnya. Berikut dipaparkan *literature review* atas penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini.

Tabel 1. 1 Tabel Literature Review

No.	Nama Peneliti, Tahun, Jurnal	Judul	Pertanyaan Penelitian	Kontribusi	Teori	Unit Penelitian	Metode	Temuan Penelitian
Jurnal Nasional								
1.	Muhammad Ghalih Karolina, Ines Saraswati Machfiroh, dan Tekad B; 2018; Jurnal Pebgabidian Kepada Masyarakat (MEDITEG), Vol.3 No 1	Evaluasi Literasi Digital Berbasis Komunitas Lokal	Bagaimana peran kearifan lokal dalam literasi media digital ?	Untuk mengungkapkan literasi digital berbasis kearifan lokal terkait pencegahan dampak buruk dari media digital	a. Konsep literasi digital oleh Bawden (2001) b. Perlunya literasi digital dalam bentuk standar oleh Inda Fitriyarni, dkk (2014)	Desa Benua Tengah	Eksploratif	a. Dalam literasi digital, kesadaran masyarakat kearifan lokal belum maksimal potensinya karena penggunaan media pasif dan terbatas b. Tindakan literasi digital memerlukan batasan berupa bentuk kearifan lokal masyarakat
2.	Vevy Liansari dan Ermawati Z. Nuroh; 2018; Proceedings of The ICECRS, Vol.1 No.3	Realitas Penerapan Literasi Digital bagi Mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Bagaimanakah realitas penerapan <i>digital literacy</i> pada mahasiswa FKIP Umsida ?	Dalam meninjau lebih lanjut terkait implementasi digital literasi dunia perkuliahan dalam mengakomodasikan kecakapan mahasiswa	a. Literasi Digital oleh Paul Gilster (2007) b. Manfaat <i>Digital Literacy</i> oleh Brian Wright (2015) c. Elemen Penting	Mahasiswa prodi PGSD mata kuliah dan pembelajaran	Kualitatif	a. Gerakan literasi digital di kampus telah terimplementasikan dan mahasiswa mampu menggunakan teknologi

				menggunakan media	Literasi Digital oleh Steve Wheeler (2012)			b. Dosen memiliki peran dalam memblock situs yang tidak berhubungan dengan pembelajaran sehingga menghindari penyalahgunaan media.
3.	Anggi Pratiwi dan Eflinnida Nurul Komaril, 2019, Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan	Implementasi Literasi Budaya dan Kewargaan sebagai Solusi Disinformasi pada Generasi Millenial di Indonesia	Bagaimana implementasi literasi budaya dan kewargaan sebagai solusi mengatasi disinformasi pada generasi milenial di Indonesia ?	Menunjukkan bagaimana gambaran disinformasi yang terjadi pada generasi millennial dan memaparkan uraian implementasi literasi budaya sebagai solusi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian Literasi oleh Yusup & Saepudin (2017) b. Pendidikan budaya oleh Saleh (2016) c. Faktor fenomena disinformasi oleh Burange dan Misalkar (2015) 	Generasi Millenial di Indonesia	Kualitatif (Studi Literatur)	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlunya pengolahan informasi dalam mengatasi fenomena disinformasi b. Pentingnya implementasi. Literasi budaya dan kewargaan pada ranah sekolah,

					d. Generasi Millennial oleh Walidah (2017)			keluarga, dan masyarakat.
Jurnal Internasional								
4.	CharleneL.Al-Qallaf dan AfafS.R.Al-Mutairi; 2016; The Electronic Library, Vol.34 Issue .3	Digital literacy and Digital Content Supports Learning : The Impact of Blogs on Teaching English as a Foreign Language	Bagaimana dampak literasi digital dalam pelajaran Bahasa asing siswa sekolah dasar ?	<ul style="list-style-type: none"> a. Dalam menyelidiki dan mengeksplorasi kesiapan pendidik dan siswa-siswi dalam lingkup digital b. Dalam mengeksplorasi persepsi pendidik dalam menjadikan siswa-siswinya produktif dalam digital masyarakat c. Dalam mengidentifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Digital Literacy oleh ALA (2013) b. Information Professionals oleh SLA (2003) c. Digital Content oleh PC Magazine Encyclopedia (2015) 	Siswa sekolah dasar di Kuwait	Kualitatif dan Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> a. Literasi digital adalah persyaratan dasar da;am menciptakan komunitas digital yang inklusif, sehingga memerlukan aksesibilitas bahasa domestic kepada konten digital b. Media dan perangkat digital bukanlah sebuah katalisator yang dapat dipecahkan

				tantangan dan kebutuhan pendidik serta siswa-sisw dalam menggunakan media online dalam konteks edukasi				c. Pendidik perlu mengatur, merencanakan, menerapkan, dan menindaklanjuti kebijakan dan strategi dalam mengakses teknologi pembelajaran sehingga menghasilkan efektivitas lingkungan belajar digital.
5.	Dana Petranova, Monika Hossova, dan Peter Velicky; 2017; Communication Today, Vol.8 Issue.1	Current Development Trends on Media Literacy in European Union Countries	a. Bagaimana analisis terhadap area prioritas literasi media di negara-negara Uni Eropa ?	a. Dalam membandingkan inisiatif pendidikan media di negara-negara Uni Eropa	Social Media Education : Literacy oleh Kourti (2012)	Negara-Negara Uni Eropa	Literatur Kualitatif	a. Literasi media adalah jenis dasar literasi yang paling diperhatikan oleh negara-negara anggota;

			<p>b. Bagaimana inisiatif kegiatan pembentukan literasi media diantara negara-negara Uni Eropa ?</p>	<p>b. Memberi gambaran secara ringkas mengenai bidang-bidang literasi yang dominan di masing-masing negara anggota</p> <p>c. Menawarkan gambaran tentang jenis literasi dan organisasi yang secara aktif berkontribusi pada pembentukan melek media di populasi Uni Eropa</p>				<p>Austria, Republik Ceko, Denmark, Jerman, Inggris, Hongaria, Italia, Belanda dan lain-lain.</p> <p>b. Pendidikan media dan pusat literasi media memainkan peran kunci dalam melatih guru dan mendidik anak-anak dan remaja di negara-negara ini. Kegiatan mereka termasuk memantau status dan</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								tingkat literasi media, menerbitkan laporan status yang terkait dengan perkembangan terbaru di bidang pendidikan media di negara-negara tertentu dan menyiapkan bahan metodologi dan utilitas praktis untuk formal, non-formal dan pendidikan keluarga di bidang ini.
6.	T Philip Nichols dan Amy Stornaiuolo; 2019; Media and	An Approach to Digital Literacy through The	Bagaimana sejarah dan perkembangan literasi informasi	a. Menawarkan laporan singkat mengenai	a. Digital Literacy oleh Paul Glistter (1997)	United States	Literatur Kualitatif	Penelitian ini berpendapat bahwa mempertimba

	Communication: Lisbon, Vol.7 Issue 2	Integration of Media and Information Literacy	dan media digital ?	<p>sejarah dan perkembangan bidang literasi informasi dan media</p> <p>b. Menegaskan bahwa mengintegrasikan dan meninjau Kembali secara strategis untuk membawa arah yang sadar untuk bernuansa kritis di ranah literasi digital</p>	<p>b. Model Literasi oleh Dale (1946)</p> <p>c. Teori sosial literasi digital oleh Bhatt & MCKenzie (2019)</p> <p>d. Literasi Media oleh Potter (2010)</p> <p>e. Literasi Media oleh Aufderheide (1993)</p> <p>f. Metode keterampilan bermedia oleh Studi Silverblatt & Eliceiri (1997)</p>			<p>ngkan sejarah dalam bidang pendidikan memiliki sejumlah manfaat berharga untuk arah masa depan literasi digital dalam dua cara utama, yaitu</p> <p>a. Mempertimbangkan sejarah bidang terkait memungkinkan untuk membedakan kesamaan dan tumpang tindih. Perlunya meninjau literasi informasi dan media secara berdampingan</p>
--	--------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								<p>akan berpeluang untuk mengintegrasikan praktisi pendidikan dalam mengatasi masalah yang dipertimbangkan oleh literasi informasi dan media sebagai bidang yang terpisah.</p> <p>b. Dengan mempertimbangkan sejarah dan praktik literasi informasi dan media, memungkinkan untuk mempermudahkan perbedaan dampak teknologi melalui</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								praktik pendidikan yang dikembangkan untuk akomodasi terlibat dengan mengurangi aspek negative nya. Degan mengenali sejarah literasi informasi dan media mampu memberi pemahaman kontribusi terhadap praktik literasi digital saat ini mengenai apa yang praktisi masa lalu lakukan untuk dijadikan pertimbangan, bukan
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								anggapan kekeliruan.
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

**Tabel diolah oleh peneliti atas review terhadap penelitian terdahulu*

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan terhadap 6 penelitian terdahulu terkait Implementasi Program Literasi Digital, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian diatas. Penelitian yang berupa uraian implementasi ini merupakan penelitian yang baru dan belum pernah dilakukan dengan konsep yang sama. Dalam memperkuat penelitian ini, maka penulis mengacu pada teori-teori dibawah ini.

1.5.1. Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan sebuah proses dalam kebijakan sebagai keputusan publik , dimana dalam proses ini melibatkan manajemen sumber daya dan aktor publik untuk turut berperan dalam setiap proses kebijakan (implementasi, formulasi, dan evaluasi). Administrasi publik diartikan sebagai art and science (seni dan pengetahuan) yang bertujuan demi menertibkan “*public affairs*” dan mewujudkan berbagai tugas yang ditentukan (Chander dan Plano, 2007).

Ahli lainnya, mengartikan administrasi publik sebagai sebuah kerjasama sekelompok orang dalam lingkup birokrasi; Cabang ilmu yang mencakup tiga cabang dalam pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif, dan hubungan diantara mereka; pemegang peran penting dalam formulasi atau rumusan regulasi pemerintah dan sebagai bagian dari proses politik; cabang ilmu yang erat kaitannya dengan kelompok swasta dan individu dalam memberikan pelayanan publik; cabang ilmu yang berbeda dengan administrasi perorangan. (Felix. A. Nigro dan L. Lyod. G. Nigro, 2015)

Selanjutnya, Ahli lainnya dalam sumber yang sama; Pasalong :2008, menyatakan bahwa administrasi publik merupakan kombinasi kompleks antara teori dan praktik, dalam mengedukasi pengetahuan mengenai relasi pemerintah sebagai pemimpin dan relasinya dengan masyarakat sebagai yang diperintah, serta memacu regulasi atau kebijakan publik untuk lebih responsif akan kebutuhan publik. Upaya administrasi publik adalah untuk melembagakan praktik manajemen supaya nilai efektivitas dan efisiensi lebih maksimal dan dapat memenuhi kebutuhan publik (Henry Harbani, 2008).

Berdasarkan definisi beberapa ahli diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa administrasi publik merupakan sebuah proses perbaikan masalah dalam masyarakat melalui kebijakan pemerintah, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh pihak dalam proses kebijakan itu sendiri demi tercapainya tujuan kebijakan tersebut.

Administrasi publik terdiri dari beberapa ruang lingkup. Terdapat 6 dimensi strategis dalam konsep administrasi publik, yakni sebagai berikut (Prof. Dr. Yeremias T. Keban, 2014) :

a. Dimensi Kebijakan

Dimensi ini berupa proses penyusunan dan pengambilan keputusan sebagai alternatif yang terbaik dalam mencapai tujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Proses ini dianalogikan sebagai mekanisme pada otak manusia dalam memberikan arahan terhadap perbuatan.

b. Dimensi Struktur Organisasi

Dimensi ini berkaitan dengan arahan struktur termasuk pembentukan unit, pembagian tugas antar unit (Lembaga-lembaga publik) dalam mencapai sasaran dan target, termasuk diantaranya kekuasaan serta tanggung jawab. Proses ini memiliki peranan dan fungsinya sendiri, serta siap untuk melaksanakan tugas ketika mendapat perintah.

c. Dimensi Manajemen

Dimensi ini merupakan dimensi proses dimana bagaimana caranya agar seluruh kegiatan yang telah terancang dapat diterapkan, dirangkap, dan di monitor untuk mencapai target institusi atau lembaga berdasarkan asas-asas manajemen.

d. Dimensi Etika

Dimensi ini memberikan tuntutan adab terhadap administrator mengenai apa yang boleh maupun tidak boleh dilakukan, apa yang baik ataupun tidak baik dalam mengendalikan etiket mereka.

e. Dimensi Lingkungan

Dimensi ini merupakan keadaan sekitar yang mempengaruhi seluruh dimensi dalam ilmu administrasi publik, yakni; dimensi struktur organisasi, dimensi manajemen, dimensi kebijakan, dan dimensi tanggung jawab moral. Tanpa adanya dimensi ini, maka dimensi-dimensi sebelumnya susah untuk berkembang. Dimensi ini mencakup sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta teknologi yang mempengaruhi administrasi publik.

f. Dimensi Akuntabilitas Kerja

Dimensi ini untuk membuktikan eksistensi dan fungsi riil pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi publik di suatu negara.

1.5.2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan arah kegiatan atau hal yang diputuskan oleh aktor maupun sekelompok aktor dalam mengatasi permasalahan yang menyangkut kepentingan banyak orang. Kebijakan memusatkan perhatiannya pada apa yang seharusnya dilaksanakan, bukan sekedar hanya pada apa yang diajukan ataupun dimaksudkan (James Anderson, 1979).

Program literasi media digital merupakan program penting pemerintah dalam menciptakan Indonesia sebagai negara dengan masyarakat canggih, aman, dan nyaman berteknologi. Program ini dimaksudkan pemerintah agar masyarakatnya cerdas di ruang digital.

Sedangkan, ahli lainnya mengartikan kebijakan publik sebagai apapun keputusan pemerintah untuk menjalankan atau tak menjalankan (Thomas R.Dye, 2012).

... "Public policy is whatever governments choose to do or not to do" ...

Ahli lainnya, memandang studi kebijakan publik atas dua perspektif, yakni sebagai perspektif politik dan administrasi. Dalam perspektif politik, kebijakan mencakup formulasi, implementasi, dan evaluasi sebagai persaingan dari berbagai kepentingan masyarakat dalam menyalurkan dan mengorganisir sumber daya yang ada sesuai dengan visi, misi, ambisi dan pengutamaan. Sedangkan Perspektif administrasi memandang kebijakan publik sebagai

kondisi yang berkaitan dengan kiat, strategi, skema, dan keterampilan pejabat publik dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik, sehingga dapat merealisasikan tujuan dan ambisi (Djadja Saefullah, 2011).

Dengan memandang kebijakan publik dari kedua perspektif ini secara seimbang dan merata, maka kita diharapkan lebih memahami mengapa suatu regulasi publik walaupun formulasi nya telah baik, namun masih terdapat kendala dalam implementasinya.

Berdasarkan definisi kebijakan publik menurut ahli diatas, maka penulis menyimpulkan kebijakan publik sebagai bagaimana keseluruhan proses regulasi yang diputuskan dan disahkan oleh lembaga pemerintah dapat mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat.

Proses kebijakan publik dibagi menjadi tahapan-tahapan sebagai berikut ini (Winarno, 2007) :

a. Tahap Penyusunan Agenda

Dalam tahap penyusunan agenda, aktor publik yang ditetapkan meletakkan permasalahan publik pada agenda publik. Permasalahan ini bersaing terlebih dahulu untuk masuk kedalam prioritas agenda kebijakan. Masalah di tahap ini hanya ditetapkan sebagai fokus dalam pembahasan.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Tahap berikutnya adalah formulasi kebijakan, dimana pada tahap ini, permasalahan yang telah masuk kedalam agenda kebijakan publik akan dibahas lebih lanjut oleh aktor pembuat kebijakan. Masalah diidentifikasi dalam

mencari pemecahannya. Pemecahan masalah diambil dari berbagai ajuan. Dalam tahap ini, masalah bersaing untuk dapat diambil keputusan sebagai pemecahannya.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Di tahap berikutnya, dari sekian banyak saran kebijakan yang diajukan oleh aktor kebijakan publik, pengambil keputusan mengadopsi salah satu alternatif kebijakan atas dukungan legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah teradopsi oleh pemerintah perlu untuk diimplementasikan, karena sebuah kebijakan tanpa pelaksanaan hanyalah rumusan regulasi sia-sia. Pelaksanaan kebijakan ini meliputi seluruh unit administrasi yang mengkoordinir sumberdaya baik itu manusia ataupun finansial

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang sudah terimplementasikan perlu diukur dan dipertimbangkan dalam melihat sejauh manakah kebijakan yang ada sudah mampu menyelesaikan masalah publik. Kebijakan publik dibuat dalam mencapai kesejahteraan publik dalam memecahkan masalah masyarakat, oleh sebab itu perlu indikator dan kriteria yang dijadikan landasan dalam penilaian apakah sebuah kebijakan telah mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai.

1.5.3. Implementasi Kebijakan

Ahli mendefinisikan sebagai pelaksanaan kebijakan publik yang mencakup individu, publik, maupun swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang dikehendaki yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan (Van Meter dan Horn, 1974).

“Policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (for group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”.

Ahli lainnya, berpendapat bahwa implementasi kebijakan perlu dilakukan dalam membuktikan bahwa implementasi kebijakan adalah aktivitas, interaksi, dan reaksi faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan (Quade, 1984).

Dari pendapat ahli-ahli di atas, maka penulis menyimpulkan implementasi kebijakan sebagai bentuk realisasi kompleks atas formulasi kebijakan dalam menyelesaikan masalah publik, dengan melibatkan seluruh pihak. Implementasi Program Literasi Media Digital direalisasikan dalam bentuk Gerakan Literasi Digital melalui seminar online oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dengan menggandeng swasta ataupun lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pelaksana dan seluruh masyarakat sebagai target program.

Dalam menjelaskan permasalahan implementasi, ahli membedakan implementasi kedalam dua pendekatan, yaitu pendekatan *Top-Down* dan *Bottom Up*. Pendekatan *Top-Down* sering dikenal dengan *policy centred*, mengingat fokus peneliti dalam pendekatan ini hanya pada kebijakan terkait,

dimana peneliti berusaha memperoleh fakta apakah implementasi kebijakan telah berhasil mencapai tujuan atau tidak (Hogwood dan Gunn, 1984). Pendekatan *Top-Down* memaparkan faktor yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, kemudian peneliti memberikan rekomendasi atas persoalan yang ada (Barret, 2004). Penelitian dengan pendekatan ini tepat untuk menggambarkan efektivitas implementasi kebijakan dalam meyakinkan apakah pelaksanaan kebijakan telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan standar ketentuan pelaksanaan. Pendekatan ini juga dikenal dengan sebutan *command and control*, atas asumsi bahwa perintah atasan terhadap bawahan lah yang menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan. Sementara, pendekatan *Bottom-Up* mengasumsikan pentingnya peran birokrat level bawah sebagai kunci kesuksesan pelaksanaan sebuah kebijakan. Penelitian studi implementasi dengan pendekatan *Bottom-Up* dilakukan dalam mengetahui serta memetakan ekonomi-politik aktor yang terlibat dalam jaringan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *Top-Down* dalam menggambarkan faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Program Literasi Media Digital di Kalangan Mahasiswa DKI Jakarta.

Tabel 1. 2 Tabel Perbandingan Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up

	<i>Top-Down</i>	<i>Bottom-Up</i>
Fokus Awal	Kebijakan pemerintah pusat	Jaringan implementasi level terbawah
Identifikasi aktor utama	Dari pusat dilanjutkan kebawah sebagai	Para implementer ke level paling atas

yang terlibat dalam proses	konsekuensi implementasi	
Kriteria evaluasi	Pencapaian tujuan formal yang teruraikan dalam dokumen kebijakan	Kurang begitu jelas apa yang dianggap penting dan relevansinya dengan kebijakan
Fokus secara keseluruhan	Bagaimana mekanisme implementasi dalam mencapai tujuan kebijakan	Interaksi strategis antar berbagai aktor yang terlibat implementasi

Sumber : Sabatier, 1984

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dipandang dalam dua perspektif yaitu *compliance perspective* (perspektif kepatuhan) dan *impact perspective* (perspektif dampak) (Ripley, 1985). Perspektif kepatuhan menggambarkan keberhasilan implementasi dari kepatuhan implementor dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan yang tertuang dalam regulasi sesuai dengan *standart operating procedure* (SOP) yang telah disediakan. Keberhasilan implementasi digambarkan dari bagaimana implementor mampu memenuhi serangkaian *checklist* aturan dalam melakukan delivery tujuan kebijakan pada kelompok sasaran. Sementara, perspektif kedua memahami keberhasilan implementasi tidak hanya dari kepatuhan implementor terhadap SOP, namun keberhasilan dalam merealisasikan tujuan program atau kebijakan dari faktor ketepatan instrument kebijakan, kecukupam, serta kualitas hasil kebijakan.

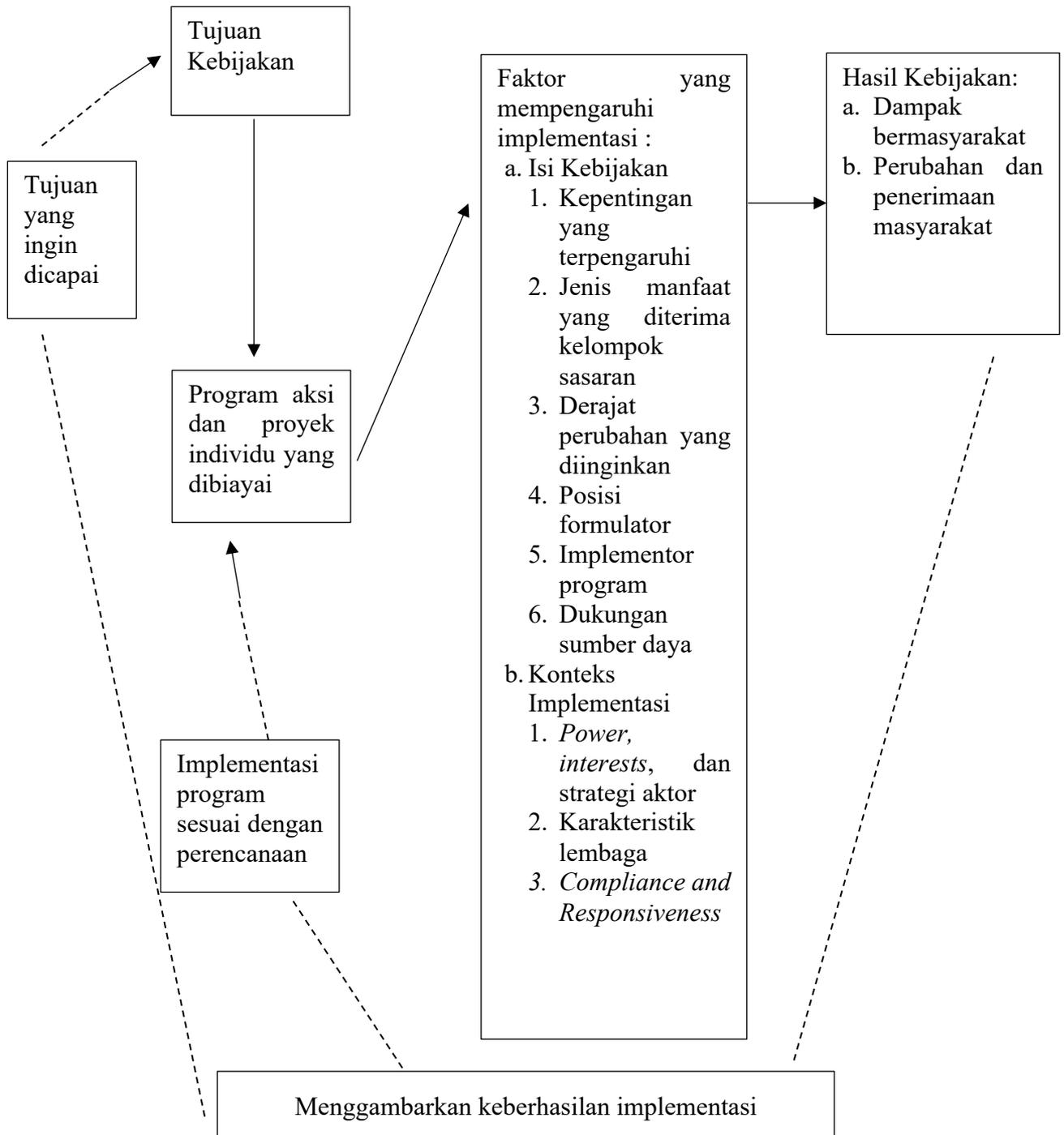
Dalam implementasi kebijakan, terdapat dua faktor yang mendorong keberhasilan implementasi yakni isi kebijakan (*content of police*) dan konteks implementasinya (*context of police*) (Grindle, 1980). *Content of police*

mencakup kepentingan yang terpengaruhi, jenis manfaat yang diterima kelompok sasaran, derajat perubahan yang diinginkan, posisi formulator, implementor program, serta dukungan sumber daya. Aspek kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan berarti semakin banyak kepentingan berbeda dalam sebuah kebijakan maka akan lebih sulit kebijakan itu diimplementasikan dibandingkan ketika kepentingan yang tersangkut lebih sedikit. Lalu, jenis manfaat yang dihasilkan adalah manfaat sebuah kebijakan tidaklah hanya secara formalitas atau simbolis, namun juga bermanfaat bagi banyak pelaku. Berikutnya, derajat perubahan yang diinginkan berarti sejauh mana perubahan diinginkan dalam sebuah kebijakan, jangka waktu perubahan, dan jenis perubahan yang diinginkan. Derajat perubahan akan mempengaruhi manfaat kebijakan. Selanjutnya, aspek posisi formulator merupakan bagaimana pusat kekuasaan pembuat kebijakan mampu mempengaruhi keberhasilan implementasi. Berikutnya, aspek implementor program adalah bagaimana kerincian pelaksana dalam mensukseskan implementasi kebijakan. Untuk dukungan sumber daya yang dimaksud adalah bagaimana sumber daya yang digunakan mampu menentukan keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan.

Sementara, *context of police* mencakup; *power, interests*, serta strategi aktor yang terlibat; karakteristik lembaga, serta *compliance and responsiveness*. Power, interests, serta strategi aktor yang terlibat mampu mendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan ketika banyak aktor yang terlibat dengan tujuan satu kepentingan. Aspek karakteristik lembaga mampu mendorong keberhasilan implementasi, karena hasil implementasi merupakan hasil dari

adanya interaksi lembaga. Untuk aspek compliance and responsiveness, mampu mendorong keberhasilan implementasi ketika pelaksana taat dalam melaksanakan program dan sigap dalam merespon masyarakat.

Gambar 1. 4. Model Implementasi Kebijakan Grindle



Sumber : Samodra Wibawa, 2004

Pada gambar diatas dijelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan digambarkan dengan apakah proses implementasi program tersebut telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Tujuan kebijakan akan tercapai apabila implementasi program tersebut berjalan sesuai dengan standar ketentuan pelaksanaan atau prosedur pelaksanaan. Tujuan kebijakan kemudian diwujudkan dan diberikan biaya kedalam program aksi ataupun program individu. Keberhasilan implementasi program akan didukung oleh dua faktor yakni isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan hasil kebijakan akan diukur melalui dampak dan perubahan yang dihasilkan oleh masyarakat dari hasil implementasi kebijakan.

1.5.4.Literasi Digital

Literasi digital merupakan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam menginovasi, mengevaluasi, memanfaatkan, serta mengkomunikasikan produk atau konten secara kognitif, etis dengan memperhatikan sosial emosional dan aspek teknis atau teknologi (UNESCO, 2011).

Literasi digital merupakan konsep luas dimana memahami kemampuan dalam menggunakan informasi berbagai teknologi dan format yang ada sebagai sumber digital (Glister, 2007).

Ahli lainnya berpendapat bahwa literasi digital merupakan kesadaran, sifat, serta kemampuan individu dalam menggunakan alat dan fasilitas digital secara tepat untuk mengidentifikasi, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, berkomunikasi, dalam konteks kehidupan yang mungkin

menciptakan tindakan sosial yang konstruktif serta merenungkan rangkaian proses (Martin dalam Kohlay, 2011).

“Digital literacy is the awareness, attitude and ability of individuals to appropriately use digital tools and facilities to identify, access, manage, integrate, evaluate, analyse and synthesize digital resources, construct new knowledge, create media expressions, and communicate with others, in the context of specific life situations, in order to enable constructive social action; and to reflect upon this process

Ahli lainnya menyatakan bahwa literasi digital berkaitan dengan pemahaman akan media digital, dimana literasi digital merupakan kemampuan dalam mengakses perangkat digital secara kritis dalam menggunakan yang dipetakan melalui representasi, bahasa, produksi, dan audiens. (Buckingham, 2015). Apabila media digital hanya dimengerti sebagai mesin dan teknik, maka pemahaman masyarakat akan media digital tidak akan utuh. Media digital perlu dianggap sebagai budaya, bukan hanya teknologi.

Dalam melaksanakan Program Literasi Digital, pelaksana mengacu pada persyaratan atau standar metode pelaksanaan Program Literasi Digital di Jawa Barat 1 dalam Paket 1 SiberKreasi, sebagai berikut:

- a. Kick-off meeting user/perwakilan yang ditunjuk dan penyedia dilakukan di DKI Jakarta.
- b. Weekly meeting user/perwakilan yang ditunjuk dan penyedia dilakukan setiap hari Jumat melalui Zoom
- c. Tempat pelaksanaan di 13 kabupaten/kota di Jawa Barat I

- d. Narasumber, moderator, dan peserta hadir online. Materi narasumber diambil dari modul Program Literasi Digital
- e. Mencari peserta di setiap 13 kabupaten/kota di Jawa Barat I dengan total target 931.357 orang
- f. Membuat timeline rencana kegiatan per bulan (terlampir)
- g. Menentukan tema per kegiatan (terlampir)
- h. Melaksanakan tahapan persiapan, pelaksanaan, pasca pelaksanaan, dan pelaporan

Berikut petunjuk pelaksanaan tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan :

a. Tahap Persiapan

- 1) Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan dinas/mitra/komunitas terkait lainnya di tingkat kabupaten/kota mengenai rencana kegiatan dan target peserta
- 2) Melakukan rapat persiapan dengan para pihak terkait pada H-3 sebelum kegiatan.
- 3) Mengusulkan, menghubungi, dan menyiapkan 2 orang narasumber level nasional yang kompeten di bidang literasi digital untuk berbicara mengenai *digital skills*, *digital safatey*, *digital culture*, dan *digital ethics*
- 4) Mengusulkan, menghubungi, dan menyiapkan 2 orang narasumber level lokal (kabupaten/kota) yang kompeten di bidang literasi digital untuk berbicara mengenai *digital skills/digital safatey/digital culture/digital ethics*

- 5) Mengusulkan, menghubungi, dan menyiapkan 1 (satu) orang key opinion leader yang memiliki citra positif di media sosial dan masyarakat, tidak pernah dipidana, memiliki akun sosial media (Instagram/twitter) dengan minimal 10.000 follower
 - 6) Mengusulkan, menghubungi, dan menyiapkan 1 (satu) orang moderator yang kompeten di bidang public speaking
 - 7) Menyiapkan dan menyebarkan undangan untuk narasumber dan moderator
 - 8) Menyiapkan dan menyebarkan undangan untuk peserta
 - 9) Menyiapkan link registrasi untuk peserta
 - 10) Menyiapkan link zoom
 - 11) Menyiapkan pre test dan post test untuk peserta
 - 12) Membuat desain flyer kegiatan, virtual background, bumper, frame, dan sertifikat
 - 13) Mengumpulkan data administrasi narasumber dan moderator
- b. Tahap Pelaksanaan
- 1) Durasi kegiatan webinar selama 3 (tiga) jam yang terdiri dari:

Tabel 1. 3 Tabel Rincian Waktu Pelaksanaan Seminar Literasi Digital

Waktu	Kegiatan	Keterangan
30 Menit	Persiapan dan briefing narasumber dan moderator	Penyedia
5 Menit	Pembukaan	Moderator
5 Menit	Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Penyedia
15 Menit	Sambutan pembicara utama	Perangkat Daerah

120 Menit	Paparan 2 Narasumber Lokal, 2 Narasumber Nasional dan 1 Key Opinion Leader	Materi : <i>Digital Skills, Digital Ethics, Digital Culture, dan Digital Safety</i>
5 Menit	Kesimpulan dan Penutup	Moderator

Sumber : Paket 1 Kerangka Acuan Kerja SiberKreasi 2021

- 2) Memastikan narasumber dan moderator hadir tepat waktu
 - 3) Memastikan peserta hadir sesuai target yang ditentukan
 - 4) Melakukan briefing dengan narasumber dan moderator
 - 5) Melakukan final check sound, video, koneksi internet, dan paparan narasumber.
 - 6) Mengelola kegiatan dengan mengizinkan narasumber, moderator, dan peserta masuk dalam kegiatan, mengatur fitur *security, share screen, mode diam, chat* serta merekam selama kegiatan berlangsung dan melakukan live streaming di platform youtube, memoderasi chatting selama kegiatan berlangsung, menyampaikan tata tertib kegiatan, mengeluarkan peserta yang tidak mengikuti tata tertib kegiatan, mengingatkan peserta untuk mengisi link post test, serta menutup kegiatan
 - 7) Membuat notulensi dan transkrip
 - 8) Mengorganisir keseluruhan kegiatan agar berjalan dengan lancar.
- c. Tahap Pasca-Pelaksanaan
- 1) Mengumpulkan hasil pre test dan post test
 - 2) Rekapitulasi hasil pre test dan post test
 - 3) Mengirimkan e-certificate untuk narasumber dan moderator
 - 4) Mengirimkan e-certificate untuk peserta

- 5) Rekapitulasi data peserta, narasumber, dan moderator
- 6) Melakukan pembayaran honor kepada narasumber dan moderator
- 7) Mengirimkan gimmick kepada peserta terpilih
- 8) Membuat dan menayangkan press release ke media massa (cetak/siar(radio/televisi)/siber) tingkat nasional atau lokal minimal di media massa

Adapun fasilitas penunjang yang perlu disediakan dalam pelaksanaan Program Literasi Digital adalah sebagai berikut:

- 1) Laptop dengan spesifikasi minimal processor i7 dan RAM 32GB untuk host dan co-host sebanyak 26 unit selama 7 bulan
- 2) Studio dan Peralatan Live streaming system yang minimal terdiri dari laptop, audio equipment, broadcast mixer, capture card, dan vmix
- 3) Akun Licensed Zoom Meetings Pro add on Large Meeting 1000 participants sebanyak 13 paket selama 7 bulan
- 4) Akun Classmarker Education Profesional Plan 2 dengan kapasitas 1000 credits per bulan sebanyak 13 paket selama 7 bulan
- 5) Akses internet 100 Mbps sebanyak 13 paket selama 7 bulan
- 6) Gimmick berupa voucher digital berupa uang elektronik/dompot digital sebanyak 20 buah senilai @Rp 100.000 setiap kegiatan
- 7) Perlengkapan protokol kesehatan yang terdiri dari : Masker medis 3 ply sebanyak 1 box, *face shield* sebanyak 5 pcs, Hand sanitizer gel pump 500 ml sebanyak 1 botol, dan desinfektan spray 280 ml sebanyak 1 botol.

- 8) Kendaraan roda 4 (minibus) untuk koordinasi Leader dan Runner di tiap kabupaten/kota selama 7 bulan
- 9) Biaya komunikasi untuk koordinasi Leader dan Runner di tiap kabupaten/kota selama 7 bulan
- 10) Biaya promosi untuk menjaring peserta setiap kegiatan yang terdiri dari (namun tidak terbatas pada) misalnya kerja sama dengan komunitas dan publikasi akun media sosial lokal selama 7 bulan

1.5.5. Literasi Media

Dalam menelaah diri kita di sosial media, kita menggunakan persepsi media sebagai perspektif aktif dalam menafsir pesan yang ditanggapi. Dengan perspektif aktif, maka ahli berharap masyarakat mampu menganalisis pesan secara kritis dan brinteraksi secara sadar (Peter, 2004).

“Media literacy is a set of perspectives that we actively use to expose ourselves to the media to interpret the meaning of the messages we encounter. We build our perspectives from knowledge structures. To build our knowledge structures, we need tools and raw material. These tools are our skills.

Ahli lainnya, mendefinisikan literasi media digital sebagai sebuah pendekatan kritis, dimana literasi media dipandang sebagai kemampuan dalam mengakses, memahami, serta mengevaluasi secara kritis isi media serta aspek media yang berbeda, serta dalam menciptakan situasi komunikasi. Literasi media mencakup seluruh media internet dan teknologi komunikasi digital (Zacchetti, 2011).

Program Literasi Media Digital merupakan sebuah program untuk meningkatkan kemampuan berperilaku masyarakat Indonesia dalam mengakses dan menganalisis secara kritis konten media, sehingga tercipta ruang digital yang aman dan cerdas.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu dan teori pada paparan point-point diatas, maka peneliti mengemukakan suatu konseptual sebagai penuntun sekaligus sebagai alur berpikir peneliti dalam menyelesaikan penelitian dengan tema implementasi serta faktor pendorong dan penghambat implementasi Program Literasi Media Digital di kalangan mahasiswa DKI Jakarta. Permasalahan dalam penelitian ini terletak pada kesenjangan antara realisasi pelaksanaan Program Literasi Digital oleh implementor dengan standar ketentuan yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dimana materi sebuah pelatihan Literasi Digital seharusnya mencakup seluruh modul pilar literasi digital dan disesuaikan dengan kebutuhan target peserta yang mengikuti pelatihan, namun kenyataannya materi yang diberikan hanya secara general untuk mengartikan literasi digital dan tidak menyesuaikan materi dengan kebutuhan peserta. Disamping itu, dalam tahap pasca-pelaksanaan, pelaksana belum memberikan pre-test dan post-test sesuai dengan mekanisme yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dengan adanya analisis atas implementasi sebuah program, maka peneliti mampu menganalisis faktor kendala dan mencari solusi atas sejauh implementasi sebuah program mampu diterapkan sesuai dengan standar operasional. Oleh sebab itu, penelitian ini ditulis

dengan tema implementasi serta faktor pendorong dan penghambat implementasi Program Literasi Media Digital di kalangan mahasiswa DKI Jakarta. Analisis dalam penelitian ini dilakukan atas implementasi sebuah program dengan kelompok yang telah mengikuti dan menggiati program ini.

Peneliti dalam penelitian ini menganalisis dan memaparkan bagaimana pelaksana Program Literasi Media Digital melaksanakan Program Literasi Media Digital dan mampu mencapai keberhasilan pelaksanaan Program Literasi Digital. Keberhasilan realisasi Program Literasi Media Digital ditentukan dari apakah pelaksanaan sesuai dengan standar ketentuan pelaksana dan mampu mencapai target sesuai dengan yang telah direncanakan. Adapun pemaparan tentang implementasi Program Literasi Media Digital di Kalangan Mahasiswa DKI Jakarta dijelaskan melalui:

1. Implementasi Program Literasi Media Digital di Kalangan Mahasiswa DKI Jakarta

- a. Tahap Persiapan: menguraikan bagaimana tahap persiapan pelaksanaan Program Literasi Media Digital dilakukan dan apakah tahap persiapan sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Program Literasi Media Digital dalam kerangka acuan kerja Siberkreasi
- b. Tahap Pelaksanaan: menguraikan bagaimana tahap pelaksanaan Program Literasi Media Digital dilakukan dan apakah tahap pelaksanaan sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Program Literasi Media Digital dalam kerangka acuan kerja Siberkreasi

c. Tahap Pasca-Pelaksanaan: menguraikan bagaimana pelaksana melaksanakan tahap pasca-pelaksanaan Program Literasi Media Digital dilakukan dan apakah tahap pasca-pelaksanaan sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Program Literasi Media Digital dalam kerangka acuan kerja Siberkreasi

2. Faktor pendorong dan penghambat implementasi Program Literasi Media Digital di Kalangan Mahasiswa DKI Jakarta

Dalam implementasi Program Literasi Media Digital di Kalangan Mahasiswa DKI Jakarta, terdapat faktor pendorong dan penghambat, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dan eksternal dideskripsikan melalui kriteria faktor keberhasilan implementasi kebijakan menurut Teori Grindle, yaitu isi kebijakan (*content of police*) serta konteks implementasi (*context of police*) (Grindle, 1980). Berikut kriteria pemaparan faktor pendorong dan penghambat implementasi Program Literasi Media Digital:

a. Isi kebijakan (content of police)

- 1) Kepentingan yang terpengaruh: memaparkan seberapa banyak kepentingan yang dipengaruhi dalam kebijakan ini
- 2) Jenis manfaat yang diterima kelompok sasaran: menggambarkan bagaimana jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran mampu mendorong atau menghambat pelaksanaan Program Literasi Media Digital di Kalangan Mahasiswa DKI Jakarta
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan: memaparkan bagaimana jenis perubahan yang diinginkan pada kelompok sasaran

- 4) Posisi formulator: memaparkan bagaimana posisi atau kedudukan pembuat Program Literasi Media Digital mendorong atau menghambat implementasi program
 - 5) Implementor program: memaparkan apakah pelaksana telah memiliki keahlian, dedikasi, serta kemampuan yang tinggi dalam mensukseskan pelaksanaan Program Literasi Media Digital
 - 6) Dukungan sumber daya: memaparkan apakah sumber daya yang digunakan mampu mendukung atau menghambat pelaksanaan Program Literasi Media Digital
- b. Konteks implementasi (*context of police*)
- 1) *Power, interests*, serta strategi aktor: menggambarkan bagaimana kekuasaan, kepentingan serta strategi aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program mampu mendorong atau menghambat pelaksanaan Program Literasi Media Digital
 - 2) Karakteristik lembaga: menguraikan bagaimana interaksi lembaga terkait yang mampu mendorong atau menghambat pelaksanaan Program Literasi Media Digital
 - 3) *Compliance and responsiveness*: memaparkan bagaimana kepatuhan dan daya tanggap pelaksana dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan Program Literasi Media Digital

1.7. Argumentasi Penelitian

Sebuah kebijakan tanpa implementasi hanyalah sebuah dokumen fisik. Implementasi kebijakan adalah tahapan detail dalam kebijakan yang merupakan

proses dinamis dan melibatkan faktor-faktor pendukung ataupun penghambat. Program Literasi Digital merupakan program yang digagas oleh Pemerintah Republik Indonesia dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memcerdaskan masyarakat dalam mengakses, memanfaatkan, serta berkreasi dalam ruang digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah menginisiasi program ini sejak tahun 2017 lampau. Dalam pelaksanaannya, implementasi Program Literasi Digital tentu mengalami tantangan, terutama ditengah pandemi sejak tahun 2020 dimana semua mekanisme pelatihan Literasi Digital dilakukan secara online. Mekanisme penyelenggaraan online ini tentu membuat monitoring akan hasil pelaksanaan terhadap peserta menjadi susah.

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat program ini sudah di realisasikan, namun dalam prosesnya, beberapa pelaksana belum mengikuti keseluruhan standar operasional pelaksanaan Program Literasi Digital. Dalam tahap penyelenggaraan, seharusnya materi dalam sebuah pelatihan Program Literasi Digital menyesuaikan kebutuhan peserta pelatihan dan mencakup keempat pilar dalam literasi digital yaitu *digital skills*, *digital culture*, *digital ethics*, dan *digital safety*; namun pada kenyataannya materi yang diberikan terlalu general dalam mengartikan literasi digital. Selain itu, tahap pasca-penyelenggaraan pelatihan belum menyediakan *pre-test* dan *post-test* untuk *monitoring* hasil kegiatan sesuai dengan ketentuan teknis yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Peneliti melakukan analisis atas implementasi dan faktor pendorong serta penghambat dalam implementasi Program Literasi Media Digital berdasarkan kriteria isi kebijakan dan konteks implementasi (Grindle, 1980). Informan dalam penelitian ini merupakan pihak Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan SiberKreasi sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mengurus proses pelaksanaan Program Literasi Media Digital, serta mahasiswa yang telah mendapatkan pelatihan literasi media digital melalui webinar dan menggiati isu pentingnya literasi media digital.

1.8. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif lebih kompleks jika dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, mengingat data yang terkoleksi dalam penelitian kualitatif biasanya subjektif dan peneliti berperan sebagai alat pengumpul data utama (Borg and Gall, 1998). Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif bersifat subyektif dan instrumen pengumpul data utama merupakan peneliti.

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini berpedoman pada tipe penelitian deskriptif, dimana peneliti memaparkan hasil analisis nya dalam bentuk paragraf mengenai bagaimana implementasi Program Literasi Media Digital di kalangan mahasiswa DKI Jakarta serta faktor pendorong ataupun penghambat realisasi Program Literasi Media digital di Kalangan Mahasiswa DKI Jakarta. Penelitian dengan tipe

deskriptif dapat memberikan pandangan terbuka dan mendalam mengenai bagaimana realisasi dari Program Literasi Media Digital telah mampu dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, terutama yang dilaksanakan di Kalangan Mahasiswa DKI Jakarta.

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian yang difokuskan atas implementasi Program Literasi Media digital ini dilaksanakan di Kota DKI Jakarta, bertempat Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku pembuat dan pengarah Program Literasi Media Digital, serta beberapa mahasiswa yang sudah mendapatkan pelatihan literasi digital sebagai target dari Program Literasi Media Digital. Peneliti mengamati bagaimana implementasi Program Literasi Media Digital serta faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi Program Literasi Media Digital di kalangan mahasiswa DKI Jakarta.

1.8.3. Subjek Penelitian

Berdasarkan pertimbangan peneliti, dalam menggali objek yang diteliti yakni Implementasi Program Literasi Media Digital di Kalangan Mahasiswa DKI Jakarta, maka peneliti memilih teknik *purposive sampling* dalam menentukan subjek penelitian, yang dianggap paling paham akan realisasi program ini. Selanjutnya, berdasarkan data yang telah diperoleh dari informan sebelumnya, peneliti memilih informan berikutnya atas pertimbangan pemberian data yang lebih lengkap karena mahasiswa terkait telah mengikuti

dan menggiati literasi media digital melalui seminar online. Subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bapak Rangga Adi Negara, Kepala Seksi Perancang Literasi Digital, Direktorat Pemberdayaan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
- b. Ibu Ivana Maida, Kepala Kepala Program and Partnership Siberkreasi *Digital Literacy Program*
- c. Ibu Ristyanadya Gupita, *Project Manager of Data and Research* dalam Program Literasi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
- d. Bapak Ulyses Sitompul, Senior Managing Partners and Consultant Public Policy yang sedang menangani Pelaksanaan Literasi Media Digital
- e. Sulthan Hanif Wicaksono, anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2019, penggiat Literasi Media Digital
- f. Clinton Makapele, Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia 2018
- g. Elsa, Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia 2018 yang pernah mengikuti pelatihan Literasi Media Digital

1.8.4. Jenis Data

Jenis data informan sebagai subjek dalam penelitian ini diperoleh ketika peneliti melakukan wawancara dengan informan, dimana data yang dihasilkan berupa lisan. Data diamati secara fisik, di notulensikan, dan digolongkan atas lokasi dan waktu. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data objek, dimana

data merupakan data tentang proses implementasi sebuah program dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

1.8.5. Sumber Data

Pengumpulan data dari sumber data dibagi kedua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer berasal dari proses wawancara atau wawancara dengan metode tanya jawab (Soerjono, 2005). Sumber primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai pembuat sekaligus lembaga yang mengkoordinasikan realisasi program dan beberapa mahasiswa DKI Jakarta selaku target dari program, yang telah memahami dan pernah mengikuti program literasi media digital.

b. Sumber Sekunder

Dalam penelitian ini, sumber sekunder diperoleh peneliti dengan cara membaca dan melakukan review terhadap penelitian terdahulu, Peraturan Pemerintah, artikel, dan makalah ilmiah.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa triangulasi yaitu teknik pengumpulan data berbeda dari informan yang sama. Teknik triangulasi dalam penelitian ini berupa observasi partisipatif, wawancara dan studi dokumentasi dalam memperoleh data terkait penelitian yang dilakukan.

Observasi partisipatif dalam penelitian ini dilakukan dengan berpartisipasi langsung pada Webinar dengan judul Sadar Rekam Jejak Digital pada bulan Mei 2022. Peneliti mengamati keseluruhan rangkaian acara apakah telah berjalan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Paket 1 Siberkreasi.

Wawancara dalam penelitian ini diperoleh dari kegiatan tempat atau lokasi dimana data tersebut diperoleh atau diperoleh secara tidak langsung yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Wawancara dilakukan secara *online* melalui *platform* zoom. Wawancara direkap dan dicatat secara rinci. Dalam wawancara, peneliti menyeleksi narasumber, mengingat spesialisasi regulasi dalam bidang informasi dan komunikasi ini harus orang yang benar-benar paham di bidang aplikasi teknologi digital. Narasumber-narasumber yang mengurus formulasi serta realisasi Program Literasi Digital lah yang menjadi kunci dalam penelitian ini atau dijadikan sebagai narasumber utama. Seluruh narasumber merupakan narasumber terpercaya. Wawancara dilakukan sejak bulan April 2022 hingga Mei 2022.

Studi dokumentasi dalam penelitian ini merupakan bentuk tulisan seperti; peraturan, kebijakan; gambar, ataupun jurnal penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang terkait dilakukan melalui proses pengumpulan data dan data teoritis yang bertujuan untuk dijadikan sebagai jenis data pembanding untuk mendapatkan data yang dapat membuktikan keakuratan dan kelengkapannya untuk penulisan laporan penelitian ini.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan adalah model analisis data kualitatif secara interaktif. Klasifikasi analisis data dipaparkan sebagai berikut (Miles dan Huberman, 1984) :

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Dalam tahapan mereduksi data, peneliti merangkum, mengerucutkan hal-hal yang ditemukan, dan mencari tema serta pola penelitian. Teknologi membantu tahapan reduksi data.

b. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa teks naratif. *Data display* mempermudah peneliti dalam memahami fenomena yang sedang terjadi dan kemudian mempermudah rancangan kerja selanjutnya. Data yang telah ditemukan harus terus diuji, mengingat penelitian kualitatif merupakan penelitian yang selalu berkembang, kompleks, dan dinamis.

c. Conclusion Drawing (Verification)

Kesimpulan pertama sifatnya sementara dan berubah sesuai dengan bukti-bukti yang sifatnya mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan bersifat kredibel saat didukung oleh data yang konsisten dan valid dalam pengumpulan data lapangan oleh peneliti.

1.8.8. Kualitas Penelitian

Dalam memastikan kualitas dalam penelitian ini, peneliti menguji kredibilitas data dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dalam uji validasi

ini artinya pengecekan ulang data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang dikumpulkan dari beberapa sumber. Kedua, triangulasi teknik, yakni mengecek data ke sumber yang sama namun teknik berbeda. Ketiga, triangulasi waktu, yakni dengan teknik sama namun waktu berbeda. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan secara teknik yakni mengecek hasil observasi dengan wawancara dan studi dokumentasi.